

Bali Post



Dampak Moratorium

Pajak Reklame 2015 Kembali Anjlok

Denpasar (Bali Post) -

Kebijakan moratorium reklame yang dilakukan Pemkot Denpasar berdampak signifikan terhadap perolehan pajaknya. Buktinya, terjadi penurunan pajak yang cukup besar pada tahun 2015 ini. Bahkan, dalam rancangan APBD Perubahan mengalami penurunan hingga Rp 4 miliar dibandingkan APBD Induk yang dirancang Rp 6,10 miliar. Artinya, pada APBD Perubahan 2015 ini perolehan pajak reklame di rancang Rp 1.6 miliar.

Pada nota keuangan APBD Perubahan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu, menunjukkan turunnya pajak reklame ini sudah terjadi sejak 2014 lalu. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5,7 miliar pada 2014 lalu, hanya mampu terealisasi Rp 1,6 miliar saja. Selain pajak reklame, juga ada pajak lainnya yang

mengalami penurunan, yakni bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Mengingat, saat ini pajak BPHTB untuk tanah waris ditetapkan

sebesar nol persen. Pajak BPHTB tahun lalu target yang dipasang mencapai Rp 145 miliar lebih, namun berhasil dicapai hanya Rp 141,2 miliar. Tidak terca-painya pajak BPHTB ini akibat adanya penurunan jumlah transaksi bila dibandingkan tahun 2013 lalu. Transaksi pada 2013 mencapai 10.800 kali dan pada 2014 hanya 8.000 transaksi.

Menyikapi hal ini, Fraksi PDI-P DPRD Denpasar melalui juru bicaranya Drs. A.A. Gede Putu Wibawa melihat secara realistis. PDI-P melihat penurunan pajak reklame akibat adanya moratorium yang dilakukan sejak 2013 lalu. Sedangkan untuk pajak BPHTB, kata dia, sangat disadari karena adanya perubahan pajak untuk tanah waris. Untuk tanah waris ini, bila ada balik nama dari orang tua kepada anaknya maka tidak dikenakan biaya. Ini merupakan wujud menjaga tanah waris masyarakat agar tidak dijual.

Sementara itu, salah satu Kabid di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Cipta Sude-wa mengatakan, kebijakan moratorim ini dilakukan untuk bisa mempercantik wajah kota. Sedikitnya ada 24 titik ruas jalan protokol yang sempat dimoratorium untuk pemasangan iklan berdasarkan Perwali No. 3 Tahun 2014. Moratorium ini telah dicabut per 15 Mei 2014 berdasarkan SK Wali Kota 568/2014. Saat ini, jumlah reklame yang bisa terpasang di 24 ruas jalan protokol tersebut hanya 204 buah reklame, dari sebelumnya mencapai 700 buah reklame sebelum moratorium. (kmb12)

: Salasa, 18 Agustus 2015 Edisi Hal



Bali Post



Dikeluhkan,

Pasien Tak Bayar Biaya Perawatan

Bangli (Bali Post) -Pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) Bali menge-luhkan adanya pasien asing asal Amerika yang tak mendapatkan perhatian dari konsulatnya. Pasalnya, sejak dirawat Maret 2015, pasien telantar ini tidak pernah membayar biaya pengobatan. Direktur RSJP Bali dr. Bagus Darmayasa didampingi Wadir M. Sihombing

dan dr. Basudewa, Senin (17/8) kemarin menjelaskan pasien bernama Sella Ane Potu kondisinya sudah membaik.

Namun sayang, sepeser pun pembiayaan perawatan tak dibayar. "Tunggakan pasien yang dirawat di ruang kelas I itu mencapai Rp 50 juta lebih," jelasnya. Untuk mengetahui identitasnya, kata Darmayasa sudah sempat menelusuri keluarga pasien tersebut termasuk mencari informasi ke tempatnya menginap di daerah Ubud, Gianyar. Namun, upayanya tak membuahkan hasil. Untuk mempercepat pengungkapan identitas, pihak rumah sakit sudah tiga kali melayangkan surat ke konsulat Amerika di Bali untuk memohon pengurusan pengobatannya. Lagi-lagi, upaya ini tidak mendapatkan

Pihak konsulat dikatakan justru berdalih hanya mengurusi masalah keimigrasian.
"Kami akan kirim surat lagi ke Dubes Amerika," tegas Darmayasa. Lanjut Darmayasa adanya tunggakan ini kerap membuatnya kelimpungan saat ada pemeriksaan BPK. Sementara itu dr. Basudewa menambahkan adanya pen-

giriman surat dari RSJP, seharusnya konsulat tersebut menyampaikan keberadaan pasien pada keluarganya. Namun, pihak konsulat terkesan tidak mau bertanggung jawab. Berdasarkan data terakhir, jumlah pasien telantar di RSJP mencapai 49 orang. Setiap bulan, pasien ini menghabiskan biaya pengobatan sekitar Rp 3,5 juta. (kmb45)

: Salasa, 18 Agustus 2015 Edisi

Hal



Bali Post



Ungkap Kasus GOR Nusa Penida Kejari Tunggu Tim Ahli

Semarapura (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri Klungkung masih menunggu kedatangan tim teknis untuk menghitung kerugian pemerintah yang disebabkan dari kasus proyek GOR Nusa Penida. Diperkirakan, 20 ahli yang akan melakukan penghitungan dengan peralatan yang dibawa langsung dari luar. Kehadiran tim ahli ini untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali dalam menghitung nilai bangunan GOR yang saat ini sudah mangkrak tidak terawat.

Kajari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan tim teknis setelah sebelumnya meminta bantuan kepada KPK dalam mengungkap kasus GOR Nusa Penida. Dengan meminta langsung KPK untuk menunjuk tim ahli, diharapkan tidak terjadi intervensi dalam mengungkap kasus korupsi tersebut.

KPK sudah menunjuk perguruan tinggi yang akan diambil sebagai tim ahli. Sekitar 20 orang ahli akan melakukan penghitungan dengan menggunakan peralatan yang akan diangkut dengan truk. "Kami masih menunggu kehadirannya. Sekitar 20 orang yang akan datang dengan peralatan sekitar 20 truk," paparnya saat dikonfirmasi, Senin (17/8) kemarin.

Di sisi lain, dua pejabat berstatus tersangka dalam kasus proyek GOR Nusa Penida yang menelan dana sekitar Rp 2,2 miliar, belum juga diungkap identitasnya. Totok Bambang hanya mengatakan kedua tersangka yang berstatus PNS itu berperan sebagai perencana dan pimpinan proyek. Keduanya sudah sempat diperiksa oleh penyidik. Namun, kemungkinan tersangka terus bertambah dalam kasus ini bisa saja terjadi.

Kejari mulai melakukan penyelidikan kasus GOR Nusa Penida awal 2015. Penyelidikan ini dilakukan sampai ke tingkat penyidikan Juni lalu. Ketika melakukan gelar perkara Juli lalu, pihak penyidik akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut dengan memegang dua alat bukti. Namun, untuk alat bukti, Kajari juga belum mau membeberkannya. Pihaknya hanya mengatakan ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 1,5 miliar dalam pembangunan GOR Nusa Penida.

Tidak ditahannya tersangka GOR Nusa Penida juga disebabkan keduanya masih berstatus PNS aktif. Kejaksaan memberikan kedua tersangka menjalankan tugasnya sebagai pegawai karena telah membuat perjanjian tidak menghilangkan barang bukti. "Yang jelas jika nanti hasil kerugian negara sudah dihitung dan turun, tidak tertutup kemungkinan mereka kami tahan," kata Totok.

GOR Nusa Penida yang berlokasi di Dusun Sampalan, Desa Batununggul, Nusa Penida, dibangun sejak 2009. Pembangunan

Edisi : <u>Sakosci, 18 Agustus 2015</u>

Hal : 10